

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS I KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Hukum

Diajukan oleh :

LAURENSIA YOSITHA

NIM : 21. C1. 0072

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS I KOTA SEMARANG)**

Skripsi:

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

LAURENSIA YOSITHA

NIM :21.C1.0072

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

NPP: 058.1.1994.1615

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2025

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I KOTA SEMARANG)” ini bertujuan untuk mengetahui peran BAPAS Kelas I Kota Semarang dalam memberikan pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana, untuk mengetahui bentuk pendampingan serta hambatan BAPAS Kelas I Kota Semarang dalam memberikan pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Objek penelitiannya yaitu terdiri dari 2 (dua) kasus tindak pidana, staf BAPAS Kelas I Kota Semarang, 1 (satu) anak pelaku tindak pidana, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder teknik studi kepustakaan dan wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BAPAS Kelas I Kota Semarang dalam melakukan pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana dilakukan mulai dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, pasca-adjudikasi, serta memberikan bimbingan lanjutan. Bentuk pendampingan yang diberikan BAPAS Kelas I Kota Semarang yaitu berupa pendampingan selama proses hukum berlangsung, pelaksanaan diversi, dan pendampingan lanjutan. Terdapat hambatan yang ditemui BAPAS Kelas I Kota Semarang dalam melakukan pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana yaitu berupa hambatan *internal* serta hambatan *eksternal*. Hambatan *internal* yang ditemui yaitu berupa kurangnya *support* atau dukungan anggaran, kurangnya SDM yang bertugas sebagai PK, serta belum seluruh PK memperoleh diklat SPPA. Adapun hambatan *eksternal*nya yaitu berupa orang tua pihak pelaku tindak pidana yang tidak kooperatif, keluarga korban menolak reintegrasi sosial, serta kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum.

Saran yang dapat diberikan yaitu BAPAS Kelas I Kota Semarang dapat melakukan kegiatan rutin berupa sosialisasi terhadap staf serta masyarakat mengenai sistem peradilan pidana anak yang bertujuan agar para staf dan masyarakat dapat mengetahui proses penanganan perkara anak sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Kata kunci: Pemenuhan Hak, BAPAS Kelas I Kota Semarang, Anak Pelaku Tindak Pidana